

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI
(SELF ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR HAYURA ARTALOLA)
TAHUN 2022**



**JL. RAYA PROPINSI NO.139 PASIRJAMBU
CIWIDEY KAB. BANDUNG
TLP :022-5928680
Email bpr.hayura@gmail.com
Website <http://bprhayura.co.id>**

**PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD COORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR HAYURA ARTALOLA
TAHUN 2022**

**BAB I
PENJELASAN UMUM**

A. Latar Belakang :

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. PT BPR Hayura Artalola (yang selanjutnya disebut "Bank") adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Hayura Artalola, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku. BPR Hayura Artalola terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan Bank Hayura Artalola juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik meskipun masih dalam masa pandemic COVID-19. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan *stakeholders*, baik intern maupun ekstern.

B. Dasar Penyusunan :

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

6. POJK Nomor 3/POJK.03.2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
7. SE OJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Tentang Penilaian tingkat Kesehatan bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat syariah
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Prinsip - Prinsip Tata Kelola :

Pelaksanaan tata kelola BPR Hayura Artalola memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut : 1. Keterbukaan (*Transparncy*); 2. Akuntabilitas (*Accountability*); 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) 4. Independensi (*Independency*); 5. Kewajaran (*Fairness*).

D. Struktur Tata Kelola Bank Hayura Artalola :

Struktur Tata Kelola BPR Hayura Artalola dibuat untuk penerapan *chech* dan *balance*, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Hayura Artalola terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko; dan Kepatuhan; dan
- 5 Pejabat Eksekutif Audit Intern (AUDIT INTERN).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Dedi Rusamsi
	NIK	: 3204170101680030
	Jabatan : Direktur Utama	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Hayura Artalola; b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR Hayura Artalola; c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Hayura Artalola di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (AUDIT INTERN), auditor ekstern, hasil pengawanan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; i. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); j. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); k. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
	Nama	: Teulis Ratna Komala
	NIK	: 3204396303710000
	Jabatan	: Direktur Operasional Yang Mambawahkan fungsi Kepatuhan.
1.	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR; b. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS; c. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan; d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan; e. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh; f. Melaksanakan Tata Kelola penyelenggaraan <i>linkage/kerja</i> sama dengan mitra bank umum; g. Melakukan kaji ulang terhadap rencana pelaksanaan dan menentukan arah pengembangan TSI, APMK, dan <i>e-banking</i>; h. Memastikan bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas TSI, APMK, dan <i>e-banking</i> BPR Hayura Artalola telah memiliki manajemen risiko yang memadai; i. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko yang melekat pada TSI, APMK, dan <i>e-banking</i>; j. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI, APMK, dan <i>e-banking</i> terintegrasi dalam manajemen risiko Bank Hayura Artalola secara keseluruhan; k. Menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan <i>due diligence</i> yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan BPR Hayura Artalola dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSI, APMK, dan <i>e-banking</i>. l. Melaksanakan RBB dalam bidang TSI. 	
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas lainnya, dan peraturan perundangan-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain; b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Hayura Artalola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya; a. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; b. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewam Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR; 	

2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<ul style="list-style-type: none"> c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia; h. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia; i. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank dalam bidang sumber daya manusia; j. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dalam bidang sumber daya manusia.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 3. APU-PPT; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) AUDIT INTERN. <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : H. Mutiq Yusmita Hadyat</p> <p>NIK : 3174071205750000</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. <p>i. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif;</p> <p>j. Melakukan <i>review</i> dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.</p>
2	<p>Nama : Tatan Suratman,SE</p>
	<p>NIK : 3273233007730000</p>
	<p>Jabatan : Komisaris Anggota</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaaris, Otoritas, dan/atau otoritas lainnya; d. Melakukan pengawasn aktif terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris; i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. a. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; b. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris; d. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 3. APU-PPT; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) AUDIT INTERN. <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hj. Gusti Nurmahrita	3174036708480004	1.119.000.000	50.89 %
2	H. Mutiq Yusmita Hadyat	3174071205750000	1.027.000.000	46.68 %
3	Dedi Rusamsi	3204170101680030	54.000.000	2,46 %

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dedi Rusamsi	3204170101680030		-	0
2	Teulis Ratna Komala	3204396303710000		-	0

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGORA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dedi Rusamsi	3204170101680030	Tidak Ada		
2	Teulis Ratna Komala	3204396303710000	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1	Dedi Rusamsi	320417010168003 0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Teulis Ratna Komala	320439630371000 0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. Mutiq Yusmita Hadyat	3174071205750000	1.027.000.000	46,68
2	Tatan Suratman,SE	3273233007730000	-	-
			-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain		Persentase Kepemilikan (%)
				A	B	
1	H. Mutiq Yusmita Hadyat	3174071205750000				0
				B		0
				C		0
2	Tatan Suratman,SE	3273233007730000		-		0
				-		0

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. Mutiq Yusmita Hadyat	3174071205750000	Tidak Ada		
2	Tatan Suratman,SE	3273233007730000	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. Mutiq Yusmita Hadyat	3174071205750000	Tidak Ada	Tidak Ada	Gusti Nurmahrita-anak Kandung
2	Tatan Suratman,SE	3273233007730000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	513.600.000	2	370.000.000
2	Tunjangan	2	56.974.744	2	45.800.000
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
	Remunerasi lainnya	2	197.170.000	2	100.500.000
	Total		767.744,744		516.300.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Penggunaan 1 Unit Mobil Operasional	Penggunaan 1 Unit Mobil Operasional
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Penggantian biaya Kesehatan secara reimburse
4	Fasilitas		

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah	2.7 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.79 : 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.79: 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1.0: 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2.57 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14 Januari 2022	2	Evaluasi Kinerja Desember 2021 dan Rencana Kerja 2022
2	29 April 2022	2	Evaluasi Kinerja Triwulan I 2022, tindak lanjut pemeriksaan OJK 2022
3	29 Juli 2022	2	Evaluasi Realisasi RBB Triwulan II 2022
4	11 September 2022	2	Evaluasi Kinerja triwulan III 2022 dan RBB 2023

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (100%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1	H. Mutiq Yusmita Hadyat	3174071205750000	4	-	100
2	Tatan Suratman,SE	3273233007730000	4	-	100

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Dalam tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus dan/atau karyawan PT.BPR Hayura Artalola Hayura Artalola.

Jumlah penyimpang internal sebagaimana tercermin dalam daftar table sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	nihil	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		nihil

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Hayura Artalola selama tahun 2022 adalah 1 (satu) tidak ada kasus pidana yang terjadi yang terkait dugaan tindak pidana perbankan, dengan rincian sebagaimana table berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabtan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	Leni Herlina	Dedi Rusamsi	Pinjaman	127,00	Intri Dirut, keputusan diambil sesuai ketentuan intern
2	Yunita Patrianovita	Dedi Rusamsi	Pinjaman	58,00	Saudara kandung Komut

Keputusan diambil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak terdapat transaksi dapat mengurangi keuntungan Bank.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan social selama tahun 2022 sebesar Rp. 36.785.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	JENIS KEGIATA	Penjelasan Kegiatan	Penerima	JUMLAH
2022-01-20	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-02-21	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-03-22	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-04-18	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-05-24	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00

2022-06-20	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-07-22	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-08-22	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-09-23	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-10-24	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-11-24	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-12-22	Sosial	IURAN WARGA RW 05 CIBURIAL BARAT	Pemerintahan RW	100,000.00
2022-01-04	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-02-09	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-03-09	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-04-06	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-05-18	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-06-03	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-07-08	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-08-05	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-09-06	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-10-05	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-11-03	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-12-06	Sosial	IURAN WARGA RW 07 MEKARGALIH	Pemerintahan RW	150,000.00
2022-01-04	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-02-09	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-03-02	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-04-05	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-05-11	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-06-03	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-07-06	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-08-05	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-09-05	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-10-06	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00

2022-11-07	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-12-05	Sosial	IURAN KEBERSIHAN WARGA RANCABALI	Pemerintahan RW	25,000.00
2022-08-02	Sosial	HUT RI KE 77 RW 07 MEKARGALIH	Panitia HUT	200,000.00
2022-08-02	Sosial	HUT RI KE 77 RW 04 SUKAGALIH	Panitia HUT	150,000.00
2022-08-16	Sosial	HUT RI KE 77 KEC. PASIRJAMBU	Panitia HUT	500,000.00
2022-08-18	Sosial	HUT RI RW 13 DESA CIWIDEY KULON	Panitia HUT	200,000.00
2022-08-26	Sosial	HUT RI KE 77 KEC. CIWIDEY	Panitia HUT	250,000.00
2022-08-29	Sosial	HUT RI KE 77 DI CIBURIAL BARAT	Panitia HUT	250,000.00
2022-08-31	Sosial	HUT RI KE 77 DESA SUGIHMUKTI	Panitia HUT	150,000.00
2022-09-02	Sosial	HUT RI KE 77 DESA PASIRJAMBU	Panitia HUT	250,000.00
2022-09-06	Sosial	HUT RI KE 77 RW 03 DESA PASIRJAMBU	Panitia HUT	150,000.00
2022-08-03	Sosial	PEMBANGUNAN MESJID KP. CUKANG GENTENG	DKM	150,000.00
2022-12-09	Sosial	SUMBANGAN PEMBANGUNAN MUSHALA SDN SUKAJADI	DKM	500,000.00
2022-04-21	Sosial	KEMATIAN KEL KARYAWANPAK DINDIN	Dindin	250,000.00
2022-06-06	Sosial	KEMATIAN KEL KARYAWAN SUNDARI	Sundari	250,000.00
2022-08-18	Sosial	KEMATIAN NASABAH		100,000.00
2022-07-12	Sosial	KEMATIAN KARANGAN BUNGA	Aep Cahya	550,000.00
2022-03-22	Sosial	KEMATIAN AYAH ORANG TUA KARY. AN HERI	Heri	250,000.00
2022-07-12	Sosial	KEMATIAN MERTUA DIRUT	Leni Marlina	500,000.00
2022-12-01	Sosial	KORBAN GEMPA CIANJUR	Perbarindo Jabar	1,385,000.00
2022-06-15	Sosial	TABLIGH AKBAR DS. SUKAJADI	Panitia HUT	250,000.00
2022-04-07	Sosial	KOORDINASI DENGAN POLISI(POLSEK PASIR JAMBU)	Polsek	100,000.00
2022-12-29	Sosial	KOORDINASI KEAMANAN LINGKUNGAN	Polsek	100,000.00
2022-07-06	Sosial	QURBAN IDUL ADHA 1444 H	Panitia Qurban	27,000,000.00
				36,785,000.00

Dalam tahun 2022, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.

M. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASESSMENT)

Pada tahun 2022, BPR Hayura Artalola melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
2. Proses Penerapan Tata Kelola;
3. Hasil Penerapan Tata Kelola.

Aspek tata kelola di atas, diterapkan pada 11 (sebelas) factor penilaian yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penerapan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Rencana Bisnis Bank; dan
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola tahun 2022 diperoleh nilai komposit **2,0** dengan peringkat komposit adalah "**Baik**", sebagaimana tercermin dalam table di bawah ini :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (D) (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	1,71	0,354
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15	2,05	0,307
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0,00	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	2,50	2,250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10	2,08	0,208
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	2,33	0,233
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5	1,50	0,038
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10	2,17	0,217
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	2,0	0,150
10	Rencana Bisnis BPR	7,5	2,37	0,178
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5	1,65	0,124
	Nilai Komposit	100		2,1
	Peringkat Komposit			Baik

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

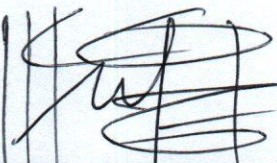
Nama BPR : PT BPR Hayura Artalola

Posisi : Tahun 2022

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assement</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,1	Baik
Analisis	
<p>1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola</p> <p>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BPR Hayura Artalola telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2. Proses Tata Kelola</p> <p>Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK hal ini sebagian besar karena <i>human error</i>.</p> <p>3. Hasil Tata Kelola</p> <p>Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penerapan tata kelola tahun 2022 diperoleh nilai komposit 2,1 dengan peringkat komposit adalah "Baik".</p>	

PT. BPR HAYURA ARTALOLA

Menyetujui :


H.MUTIQ YUSMITA HADYAT
Komisaris Utama



DEDI RUSAMSI
Direktur Utama